



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

REKRUTMEN DAN KADERISASI PEREMPUAN
DALAM PARTAI POLITIK
STUDI KASUS DPC/DPD PARTAI POLITIK KOTA
BANDUNG

Skripsi

Oleh

Harbert Kay Shan Zebua

2013310001

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

REKRUTMEN DAN KADERISASI PEREMPUAN
DALAM PARTAI POLITIK
STUDI KASUS DPC/DPD PARTAI POLITIK KOTA
BANDUNG

Skripsi

Oleh

Harbert Kay Shan Zebua

2013310001

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Harbert Kayshan Zebua
Nomor Pokok : 2013310001
Judul : Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik, Studi Kasus DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 27 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

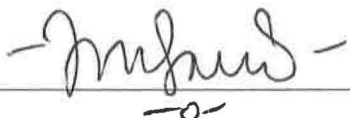
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo

: 

Sekretaris

Dr. Indraswari

: 

Anggota

Drs. Hubertus Hasan Ismail, M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Harbert Kay Shan Zebua
NPM : 2013310001
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Kasus: DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2017




Harbert Kay Shan Zebua

ABSTRAK

Nama : Harbert Kay Shan Zebua

NPM : 2013310001

Judul : Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik

(Studi Kasus: DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekrutmen dan kaderisasi perempuan terhadap lima partai politik di kota Bandung sesuai dengan amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta PKPU Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup proses perekrutan sumberdaya perempuan untuk bergabung kedalam partai politik, sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik untuk mempersiapkan anggota maupun kader perempuan dalam partai untuk memenuhi kuota 30% pencalonan sebagai anggota legislatif dan mempunyai modal baik secara sosial, politik, dan kemampuan untuk berkiprah di ranah politik yang disusun dan diintegrasikan kedalam AD/ART sebuah partai politik, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya perempuan dalam lembaga legislatif.

Pendekatan sistem politik David Easton serta pendekatan *logic model* McLaughlin dan Jordan akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada tahapan kualitatif diambil sebanyak 20 informan yang terdiri dari pengurus partai, anggota DPRD Kota Bandung, serta pengurus organisasi sayap partai politik. Pemilihan topik penelitian ini didasari oleh isu rendahnya perempuan dalam melakukan politik praktis, terutama dalam lembaga legislatif yang menjadi media untuk pembuatan kebijakan, terlebih dalam pembuatan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan rekrutmen dan kaderisasi terhadap perempuan berdampak pada peningkatan jumlah anggota perempuan sebagai anggota partai dan faktor non partai politik yang menjadi penghalang perempuan berkiprah di dunia politik.

Kata Kunci: Rekrutmen, Kaderisasi, Faktor.

ABSTRACT

Name : Harbert Kay Shan Zebua

NPM : 2013310001

*Title : Recruitment and Cadreization of Women in Political Parties
(Case Study: DPC / DPD Political Party of Bandung)*

This research is appointed to analyze the recruitment process and women cadre recruitment in five different political parties in Bandung according to the Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, and also PKPU Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota which includes the process of the recruitment of women resources to join the political party, the cadre recruitment system that political party does to prepare their members or their women cadres inside the party to fulfill the 30% of quota of the nomination as the legislative members and has capital either in social, political, and the ability to perform in the political realm which has been arranged and integrated into AD/ART of a political party, also to know acknowledge any factors that affects the low level of women in the legislature.

The political system approach made by David Easton, also the logic model approach by McLaughlin and Jordan will be used as the tools to analyze of this research. The approach-type which was used is 'qualitative research'. In the phase of qualitative, 20 informants were taken, which consisted of the executive board of the party, members of the DPRD Kota Bandung, and also the the executive board from the wing political party. This topic was selected based on the issue of the low level of women performing the political practices, especially in the legislature which is act as the media to create public policies, therefore in the making of policies that goes to fullfil women needs.

The Result of this research shows the recruitment and cadre recruitment to the impact on increasing the number of female members as party members and external factors that prevent women from taking part in political world.

Keywords: Recruitment, Cadre Recruitment, Factors.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, yang berjudul **“Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik” Studi kasus DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung.** Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang teramat dalam kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala anugerah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis serta telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan segala isi hati dan pikiran penulis dalam hidup. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Maimun Zebua dan Ibu Agustina Gulo, serta abang dan adik saya, Raymond Zebua, dan Claresta Zebua, terima kasih saya ucapkan dan sampaikan untuk setiap doa, dukungan, dan semua hal yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.

Kepada Ibu Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing, izinkan penulis untuk menyampaikan apresiasi, rasa hormat, dan ucapan terima kasih atas semua arahan, bimbingan, nasihat, masukan, dan juga waktu yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai. Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Deny Marcellinus Tri Aryadi, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Bapak Pius Suratman Kartasmita, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Susana Ani Berliyanti, Ibu Maria Rosarie Harni, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Trisno Sakti Herwanto, terima kasih atas semua ilmu, didikan, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Andoko, segenap dosen Ilmu Administrasi Publik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen MKU, pegawai Tata Usaha, dan seluruh pihak yang terlibat dengan penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada sekretariat DPRD Kota Bandung, Bu Ina, dan Bu Nadjma.
7. Kepada segenap pengurus DPC Partai Gerindra Kota Bandung, Pak Ugai, Pak Fauzi Hassan, Pak Ganda, Pak Dang Heri, Bu Yeti.

8. Kepada segenap pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Pak Yudi, Bu Rike, Pak Ari Setia Sakti, Bu Lina Yuliana, Bu Diah, Bu Fifi.
9. Kepada Bu Selly Pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
10. Kepada segenap pengurus DPD Partai Golkar Kota Bandung, Pak Yuniarso, Bu Imas, Bu Nenden (anggota DPRD), Bu Nenden (KPPG), Pak Sofyan Nurdin, Bu Ratna, Bu Sekar, Bu Esa.
11. Kepada segenap pengurus DPD PKS Kota Bandung, Pak Iman, Pak Agus, Pak Irwan Nasril
12. Kepada Bu Salmiah, pengurus DPW PKS Jawa Barat.
13. Kepada Pak Riana, dan Bu Wike, Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bandung.
14. Untuk Agriani Harefa yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan juga nasehat kepada penulis dan yang selalu setia menemani pagi, siang, malam.
15. Teman-teman KORAN (Aditya Rizaldy, Rosa Santika, Gusti Mulyadi, Willya Monica T, Fransisco Xaverio M.T, Dominikus Savio, Bram Hendratama, Muhammad Dani Hilman)
16. Kosan Beringgas Ranca Bentang II (Firmansyah, Yan Ferguson Sipayung, Bang Bade, Bang Aron, Bang Aldo, Dendy F, Andre Lubis, Aufa, Bobby 8 dan 9, Vano, Yosua, Rendi, Regi, Aldi, Rifan)
17. Medicomrade 2011 (Hans S. D. Tobing), 2012 (Ray Kevin B.J.M.), 2013 (Tommy), 2014, 2015, dan Kang Gagah (Medic 1999)
18. Teman-teman FISIP 2013

19. Teman-teman Administrasi Publik 2013,
20. HMPSIAP 2014/2015 dan HMPSIAP 2015/2016
21. Kelompok Pesawat Tempur dan Ombak Badai Medic 2013 Tommy, Alex,
Evan, Harits, Firmansyah, Ramadhan S.

Akhir kata, peneliti mengucapkan semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik peneliti harapkan untuk menambah pengetahuan yang akan sangat bermanfaat nantinya.

Penulis

Habert Kay Shan Zebua

2013310001

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstrack	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penelitian	8
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Administrasi Publik.....	9
2.2. Pengertian Ilmu Politik.....	13
2.3. Relevansi Topik.....	14
2.4. Pengertian Partai Politik.....	16
2.4.1. Fungsi Partai Politik.....	19
2.5. Rekrutmen Politik	22

2.6. Konsep Kaderisasi.....	25
2.7. Hubungan Antara Rekrutmen dan Kaderisasi.....	27
2.8. Model Berpikir.....	29
2.8.1. Pendekatan Sistem Politik.....	29
2.9. Operasionalisasi Variabel.....	42
3. BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian.....	46
3.2. Pemilihan Informan.....	48
3.3. Peran Peneliti.....	49
3.4. Lokasi Penelitian.....	49
3.5. Sumber Data.....	50
3.5.1. Sumber Data Primer.....	50
3.5.2. Sumber Data Sekunder.....	50
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7. Analisis Data.....	52
3.8. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
4. BAB IV PROFIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Kota Bandung.....	57
4.1.1. Profil Kota Bandung.....	57
4.2. Profil Partai Politik.....	60
4.2.1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).....	61

4.2.2. Partai Golongan Karya (Golkar)	69
4.2.3. Partai Gerindra	80
4.2.4. Partai Demokrat.....	86
4.2.5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	93
5. BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL PENELITIAN	
5.1. Gambaran Umum	113
5.2. Input dalam Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik	114
5.3. <i>Political System</i>	117
5.4. <i>Output</i>	131
5.5. <i>Environment</i>	133
6. BAB VI KESIMPULAN	
6.1. Kesimpulan	139
6.2. Rekomendasi.....	141
Daftar Pustaka	144
Lampiran	151

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perkecamatan semester 2 tahun 2016 hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri.	59
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model <i>Political System</i> David Easton.....	40
Gambar 2.2 Model Penelitian	41
Gambar 3.1. Komponen Analisis Data	53
Gambar 4.1. Lambang Kota Bandung.....	57
Gambar 4.2. Logo Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan	61
Gambar 4.3. Logo Partai Golongan Karya.....	69
Gambar 4.4. Logo Partai Gerindra	80
Gambar 4.6. Logo Partai Demokrat	86
Gambar 4.7. Logo Partai Keadilan Sejahtera.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Paduan Wawancara.....	152
Lampiran 2. AD/ART Kelima Partai Politik terkait Rekrutmen dan Kaderisasi.....	157

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
UU	: Undang-Undang
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Golkar	: Partai Golongan Karya
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kesetaraan gender merupakan sebuah isu yang sangat kompleks. Hingga saat ini perbedaan kedudukan perempuan dan laki-laki masih dapat ditemukan baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran perempuan relatif masih kurang dalam keterlibatan mereka pada pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingan perempuan. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan sebuah sarana agar perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) yang dapat memberikan kontribusi pada kesetaraan gender dan dalam kehidupan berdemokrasi. Salah satu media bagi perempuan untuk berkontribusi dalam memproduksi kebijakan yang responsif gender ialah dengan ikut aktif kedalam praktik politik dengan menduduki jabatan-jabatan politik di pusat pemerintahan, maupun di berbagai daerah provinsi, kota, kabupaten.

Konstruksi sosial perempuan yang berbeda adalah poin penting agar perempuan terwakili dalam ranah politik. Perempuan memiliki pengalaman dan kepentingan berbeda, bahkan dalam beberapa aspek bertentangan, dengan laki-laki yang tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan.¹

Salah satu media yang dapat membantu perempuan untuk menduduki jabatan politik adalah dengan ikut serta dan bergabung dengan salah satu partai, sederhananya, perempuan akan lebih memiliki kesempatan yang besar menjadi aktor politik dengan berpartai politik, baik itu sebagai kader maupun sebagai pengurus partai. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan afirmatif (*affirmative action*). Kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk membantu perempuan mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki.²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 mengatur bahwa partai politik harus melakukan rekrutmen dan

¹W. R. Institue, 'Keterwakilan perempuan di parlemen' <http://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-di-parlemen#.V86oQU197IU> (diakses pada tanggal 6 September 2016 pk1 20.01)

² 'Affirmative Action' <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action> (diakses pada tanggal 6 September 2016 pk1. 20.20 Wib)

kaderisasi terhadap para kader partai. Dalam pasal 4 tercantum bahwa sebuah partai politik menyusun anggaran dasar yang berisikan tentang mekanisme rekrutmen keanggotaan partai dan sistem kaderisasi, mengharuskan partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia dengan tahapan seleksi kaderisasi yang demokratis.³

Menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo mendefinisikan *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*⁴ partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan dengan menempatkan para anggota partai melalui kontrol yang tepat yang akan memberikan manfaat serta keuntungan bagi partai politik.

Menurut Miriam Budiardjo⁵, salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan rekrutmen politik dengan tujuan untuk meregenerasi kepemimpinan dalam sebuah partai, sekaligus memperluas dan memperbanyak keanggotannya.

Selain memenuhi kewajiban untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi, sebuah partai politik juga memiliki tugas untuk memenuhi kuota pencalonan perempuan dalam pemilihan legislatif. Hal tersebut menjadi

³ Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011

⁴ M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal 404

⁵ *Ibid* 408

perkerjaan rumah bagi partai politik dimana disatu sisi harus melakukan rekrutmen dan kaderisasi terhadap sumberdaya perempuan sekaligus mempersiapkan mereka, salah satunya untuk dapat memenuhi kuota pencalonan sebagai anggota legislatif yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peran partai politik sangat besar dalam melakukan pengkaderan terhadap para anggotanya.

Dengan disahkannya PKPU Nomor 7 Tahun 2013 semakin memperkuat bahwa pemerintah peduli terhadap rendahnya perempuan dalam lembaga legislatif. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan mengupayakan perempuan dalam menduduki jabatan politik ialah dengan menerapkan pola *Zipper System*. *Zipper System* adalah sistem yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan diantaranya. Contoh dari penerapan *zipper system* tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1,2,atau 3 dan tidak dibawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, maka seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6.

Akan tetapi, meskipun berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk membantu perempuan dapat terlibat dalam perpolitikan namun sebagai **contoh kasus** masih ditemukan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Di DPRD kota Bandung ditemukan bahwa jumlah anggota DPRD perempuan kota Bandung hanya berjumlah 3

(tiga) dari 50 (lima puluh) anggota DPRD terpilih untuk periode 2014-2019. Ketiga anggota perempuan terpilih tersebut berasal dari partai PDIP, PKS, dan Golkar. Sedangkan partai lain seperti Gerindra, Demokrat, Hanura, Nasdem, PPP, dan PKB yang ikut menyertakan calon perempuannya belum mampu mendapatkan kursi di DPRD.⁶ Konstelasi ini mengalami penurunan jumlah anggota perempuan jika dibandingkan pada periode DPRD kota Bandung 2009-2014 dimana jumlah anggota perempuan terpilih mencapai 9 (Sembilan) orang.⁷ Rendahnya jumlah perempuan yang turut serta melakukan politik praktis dapat mempengaruhi regulasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan perempuan.

“jadi memang urusan perempuan itu bisa dipikirkan oleh kaum laki-laki dan juga perempuan, tetapi biasanya kaum perempuan lebih tahu apa kebutuhannya, namun saya tidak mendikotomikan kaum laki-laki, tetapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang terkait perempuan dan anak yang lebih dimengerti oleh perempuan sendiri, karena dia mengalami itu sendiri, terakit dengan itu memang kita merumuskan berdasarkan fakta yang terjadi, misalnya katakanlah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, perlindungan perempuan, perlindungan anak, yang kita rasakan masih sangat minim regulasi yang mengaturnya, terlebih untuk daerah, karena tugas dari DPRD itu adalah membuat perda.”⁸

Rekrutmen dan kaderisasi partai politik terhadap sumberdaya perempuan sangat penting dilakukan, hal ini bertujuan disatu sisi untuk

⁶ ‘Profil Anggota Dewan’ <http://www.dprd-bandungkota.go.id/> (diakses pada tanggal 7 September 2016 pkl 13.30 Wib)

⁷ ‘Daftar Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014’ http://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=1&totalRows_rsAnggotaParlemen1=50&maxRows_rsAnggotaParlemen1=25&idJenisParlemen=5&idParlemen=407&idKabKota=377&cariAnggotaParlemenDaerah=y (diakses pada tanggal 7 September 2016 pkl 14.00 Wib)

⁸ Hasil wawancara dengan SM Pengurus DPW PKS Jawa Barat (14 Maret 2017, 14.35 Wib)

memperbanyak anggota perempuan dalam partai sekaligus memberikan kemudahan untuk partai politik dalam memenuhi kuota pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap rekrutmen dan kaderisasi partai politik terhadap perempuan dengan judul *Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik” Studi kasus DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung*, dimana penelitian ini akan fokus untuk mengetahui bagaimana rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik khususnya di kota Bandung dan apa yang menjadi faktor penghalang para perempuan sehingga tidak mampu untuk berperan dalam dunia politik, salah satunya di ranah legislatif.

Penelitian akan dilakukan pada wilayah kota Bandung. Penelitian terhadap rekrutmen dan kaderisasi perempuan dalam partai politik ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara dan strategi partai politik untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang diantaranya rekrutmen dan kaderisasi serta bagaimana upaya partai politik memanfaatkan rekrutmen dan kaderisasi salah satunya untuk memenuhi kuota pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan bertolak pada latar belakang masalah dan rumusan pertanyaan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini dengan menggunakan teori dari David Easton yang terdiri dari *input*, *Political System*, dan *Output* adalah sebagai berikut :

1. Apa menjadi *input* dalam proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik di DPC/DPD kota Bandung terhadap anggota perempuan ?.
2. Bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPC/DPD partai politik kota Bandung terhadap para rekrutmen perempuan ?.
3. Bagaimana *output* dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik di DPC/DPD kota Bandung ?.
4. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya perempuan dalam melakukan praktik politik, salah satunya di ranah legislatif ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan *input* dalam proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik di DPC/DPD kota Bandung terhadap anggota perempuan.
2. Mendeskripsikan proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPC/DPD partai politik kota Bandung terhadap para rekrutmen perempuan.
3. Mendeskripsikan *output* dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik di DPC/DPD kota Bandung.

4. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi rendahnya perempuan dalam melakukan praktik politik, salah satunya di ranah legislatif.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi partai politik terkait pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk dapat meningkatkan konstelasi perempuan untuk melakukan politik praktis melalui rekrutmen dan kaderisasi agar mampu menduduki jabatan politik maupun berperan aktif dalam pemerintahan.

1.5. Sistematika Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai *Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik” Studi kasus DPC Partai Politik Kota Bandung*. Dalam penelitian akan berupaya untuk mengidentifikasi rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Profil Penelitian, Bab V Analisa dan Interpretasi Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran.